

CASCADING DINAS KOMINFO SP KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SASARAN RPJMD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan		BUPATI
INDIKATOR SASARAN	Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai SAKIP dan Opini BPK			Indeks Desa Membangun		
TUJUAN DISKOMINFOSP	1. Meningkatkan Akuntabilitas Diskominfo-SP	2. Digitalisasi Penyelenggaraan Seluruh Urusan Pemerintahan yang diDesentralisasikan ke Kabupaten	3. Meningkatkan Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika Daerah	4. Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral	5. Meningkatnya Layanan Persandian	KEPALA DINAS
INDIKATOR TUJUAN	Persentase Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Digitalisasi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 2. Jumlah Informasi Publik yang terpublikasi 3. Jumlah Data Statistik yang dikelola 4. Jumlah Informasi Pemerintah Daerah yang diamankan dengan Persandian	Luasan Wilayah yang telah terlayani Jaringan Telekomunikasi	Persentase Data Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian	
SASARAN DISKOMINFOSP	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat 2. Meningkatnya Nilai SAKIP 3. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada setiap Urusan Pemerintahan 2. Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Publik yang berkualitas 3. Integrasi Data Statistik Sektoral 4. Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Layanan Telekomunikasi dan Informatika Daerah 2. Meningkatnya Sarana Telekomunikasi	Terselenggaranya Pelayanan Data Statistik Sektoral sesuai Prinsip Satu Data Indonesia	Meningkatnya Pengelolaan Persandian Daerah	
INDIKATOR SASARAN DISKOMINFOSP	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Diskominfo SP 2. Nilai SAKIP	1. Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Menerapkan Proses Digitalisasi Pelayanan Publik 2. Persentase PPID yang Aktif 3. Persentase KIM yang Aktif 4. Jumlah Informasi Publik yang terpublikasi 5. Jumlah OPD yang terintegrasi data Statistik Sektoral 6. Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian	1. Persentase Wilayah yang terlayani Jaringan Komunikasi 2. Indeks SPBE 3. Persentase Desa yang terjangkau Sarana Telekomunikasi 4. Persentase Desa menggunakan Website Desa	1. Jumlah Data Sektoral yang dideseminasi 2. Jumlah SDM Pemda yang memiliki kualifikasi Teknis terkait penyelenggaraan Statistik Sektoral 3. Persentase metadata yang terbangun 4. Jumlah SDM Pengelola data yang memiliki kualifikasi teknis terkait penyelenggaraan statistic 5. Jumlah Infrastruktur Keras yang tersedia dan Infrastruktur Data yang dikembangkan 6. Jumlah Peraturan Bupati tentang Selayar Satu Data	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	
PROGRAM	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Program Aplikasi Informatika	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi		
INDIKATOR PROGRAM	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kominfo	Tersedianya Informasi Berbasis Teknologi Informasi	Tersedianya Data Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengamanan Informasi Daerah		
KEGIATAN	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota 2. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		KASUBAG DAN KASI
INDIKATOR KEGIATAN	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	1. Persentase Sub Domain yang dikelola 2. Persentasi e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kab./Kota dikelola	Persentase Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota terselenggara	Persentase Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		
ANGGARAN	Rp. 1.250.000.000,-	Rp. 661.796.000,-	Rp. 142.993.000,-	Rp. 178.184.500,-		

